

17 Desa di Pandeglang Belum Cairkan Dana Desa Tahap III

PANDEGLANG (IM)- Sebanyak 17 desa di Pandeglang, hingga saat ini belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap III, lantaran masih ada kegiatan di tahap sebelumnya yang belum diselesaikan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Bunbun Buntara mengungkapkan, untuk desa yang sudah menyerap DD tahap III saat ini belum semuanya, masih ada 17 desa yang belum bisa mencairkan DD tahap III tersebut.

“Ada 17 desa lagi yang hingga saat ini belum mencairkan DD tahap III. Namun saat ini sedang berproses,” ungkapnya, Rabu (15/11).

Dikatakannya, bagi 17 desa tersebut belum bisa mencairkan DD tahap III ada beberapa faktor, mulai dari administrasinya belum selesai dan juga ada kegiatan dari tahap sebelumnya yang belum diselesaikan.

“Persyaratannya belum lengkap, dan ada juga kegiatan-kegiatan fisik yang belum diselesaikan, sehingga itu jadi faktor belum bisa mencairkan DD

tahap III,” katanya.

Saat ditanya desa mana saja yang sampai saat ini belum bisa mencairkan DD tahap III, Bunbun mengaku, kalau nama-nama desanya ia belum mengetahui secara persisi, karena bawahannya belum memberikan data desa yang belum mencairkan DD tahap III tersebut. “Nanti saya tanya dulu ke staf saya, desa mana saja yang sampai saat ini belum mencairkan DD tahap III itu,” ujarnya.

Namun lanjut Bunbun, ke 17 desa tersebut sedang memproses pengajuan, dengan harapan di akhir bulan ini bisa segera terserap. “Soalnya jika sampai lewat dari tahun 2023 ini maka desa itu akan kena finaliti,” tuturnya.

Pihaknya juga berharap kepada Pemerintah Desa (Pendes) yang belum bisa mencairkan DD tahap III agar segera menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang belum rampung. “Apa saja yang menjadi hambatan proses pencairan DD tahap III, saya harapan pihak desa bisa segera menyelesaikannya supaya tidak kena finaliti,” harapnya. ● pra



IDN/ANTARA

KEBAKARAN PABRIK PEMINTALAN KAPAS DI BANDUNG

Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api saat kebakaran yang terjadi di pabrik pemintalan kapas di Bandung, Jabar, Rabu (15/11). Penyebab kebakaran pabrik pemintalan kapas tersebut masih dalam penyelidikan petugas pemadam kebakaran Kota Bandung.

Satpol PP Hentikan Aktivitas Galian Tanah Ilegal di Tangerang

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Agus Suryana mengatakan aktivitas galian tanah tersebut dihentikan setelah mengerahkan tim Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Tangerang usai menerima aduan dari masyarakat.

TANGERANG (IM)- Satpol PP Kabupaten Tangerang menghentikan sementara aktivitas galian tanah ilegal yang berada di wilayah Kampung Bugel, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, Banten.

Lahan galian tanah itu

hentikan lantaran melakukan aktivitas yang mengganggu Trantibum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Agus Suryana mengatakan aktivitas galian tanah tersebut dihentikan setelah mengerahkan tim

Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Tangerang usai menerima aduan dari masyarakat.

“Dihentikan sementara karena galian tersebut sudah mengganggu ketertarikan dan ketertiban umum masyarakat sekitar dan kami memanggil pengelola untuk ke Kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang guna pemeriksaan perizinan yang dimilikinya,” katanya, Rabu (15/11).

Kata Agus, dari hasil investigasi di lapangan terdapat beberapa alat berat jenis eskavator dan armada truk yang berada di lokasi

aktivitas galian tersebut.

Ia pun berkomitmen, segala bentuk aktivitas yang mengganggu ketertarikan masyarakat akan langsung ditindak.

“Kami tidak akan memberikan toleransi pada aktivitas galian tanah ilegal dan sudah mengganggu ketertarikan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Untuk itu, saya berpesan kepada masyarakat agar segera melapor ke Satpol PP Kabupaten Tangerang jika ada informasi kegiatan penambangan ilegal dan meresahkan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan

Perundang-undangan Daerah, Satpol PP Kabupaten Tangerang, TB Muhammad Waisulkurni menambahkan bahwa pihaknya tidak segan-segan menindak segala aktivitas usaha yang menimbulkan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Guna terciptanya kenyamanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Tangerang, Kita tidak akan segan-segan melakukan penindakan segala aktivitas yang mengganggu ketertarikan dan ketertiban umum,” pungkasnya. ● pp

Harga Cabai di Kabupaten Tangerang Semakin ‘Pedas’

TANGERANG (IM)- Fenomena El-nino ternyata berdampak pada harga cabai yang kini melejit hingga tembus di angka Rp 100 ribu per kilogramnya.

Salah satu pedagang sayur di Pasar Tradisional Cisoka, Hamdan mengatakan, harga cabai rawit merah kini mencapai Rp 90 ribu per kilogram. Naik berkali-kali lipat dari harga sebelumnya, pada Oktober yang hanya mencapai Rp 40 hingga Rp 50 ribu saja per kilogram.

Bahkan, kata Hamdan, pada September lalu, harga cabai rawit merah berada di angka Rp 30 ribu saja. Namun, kini sudah tembus mencapai Rp 90 ribu, dan itupun hanya di Pasar Cisoka. “Di Pasar Cisoka, kini mencapai Rp 90 hingga Rp 100 ribu. Oktober lalu, hanya Rp 40 hingga Rp 50 ribu,” kata Hamdan.

Menurut Hamdan, kenaikan harga cabai rawit merah ini, dikarenakan efek domino dari kemarau panjang yang

hingga kini masih terasa.

Karena, pada saat kemarau berlangsung banyak petani-petani cabai yang turun produksinya. “Kayaknya akibat efek kemarau panjang kemarin. Meski saat ini sudah turun hujan, tapi cabai yang ada produksinya pas kemarin. Kalau perkiraan saya, harga cabai akan tetap di harga Rp90 sampai Rp100 ribu sampai nanti tahun 2024,” katanya.

Di tempat terpisah, Pedagang Pasar Tradisional Tigaraksa, Udin menambahkan, harga cabai di tempat dia berdagang, kini telah mencapai Rp 100 ribu.

Udin juga mengatakan, bahwa naiknya harga cabai diakibatkan efek kemarau panjang yang masih mencejring para petani cabai. “Ini juga imbas dari kemarau panjang. Mudah-mudahan dengan situasi yang saat ini sudah mulai turunnya hujan, harga cabai bisa stabil turun,” pungkasnya. ● pp

Proyek Bendungan Daerah Irigasi Cimoyan Pandeglang Disetop

PANDEGLANG (IM)- Proyek bendungan Daerah Irigasi (DI) Cimoyan di Desa Ciharang, Kecamatan Picung, Pandeglang dihentikan warga. Palsanya pembebasan lahan pada proyek tersebut belum diselesaikan oleh pihak dinas terkait terhadap para pemilik lahan.

Diketahui sebelumnya, proyek tersebut merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air pada Balai Besar wilayah sungai Cidanau, Cijujung, Cidurian (BWSC3).

Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 15 miliar tersebut dikerjakan oleh pihak kontraktor dari PT Legend Bukit Konstruksi, dengan pengawas dari PT Sigma Karya Desain dan PT Guna Panca Data. Luas lahan yang digunakan untuk proyek tersebut seluas kurang lebih 3 hektar.

Manajer Teknik dari PT Legend Bukit Konstruksi, Tedi

Heryadi membenarkan, jika pembangunan bendungan yang dilakukannya saat ini diberhentikan sementara waktu.

“Sekarang pekerjaan di off dulu. Warga atau pemilik lahan meminta untuk dihentikan sementara,” ungkap Tedi melalui pesan WhatsApp nya, Rabu (15/11).

Adapun progres pembangunan kata Tedi, sudah mencapai 80 persen. Namun sekarang pekerjaan di off dulu terkait masalah pembebasan lahannya.

“Ada proses atau tahapan yang sedang berjalan yang ditangani oleh panitia pembebasan,” katanya.

Terpisah, Camat Picung, Arif juga membenarkan, jika proses pekerjaan pada proyek bendungan di wilayahnya itu disetop sementara waktu karena berkaitan dengan pembebasan lahannya. ● pra

Pemkab Bogor Sampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Selasa (14/11).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, hadir mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda), Burhanudin, para wakil ketua dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda beserta jajaran

Pemkab Bogor.

Sekda Burhanudin menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2024 yang telah disetujui bersama beberapa waktu lalu, berikut disampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

“Stabilisasi ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pelayanan publik, kinerja aparatur, dan penataan administrasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah,” terang Burhanudin.

“Hari ini kami menyam-

paikan gambaran umum tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Kami berharap pimpinan dan seluruh anggota DPRD dapat menerima penyampaian Rancangan APBD beserta Nota Keuangan APBD tahun anggaran 2024 untuk selanjutnya dibahas di tingkat komisi, maupun di badan anggaran.

“Terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor, mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban,” ungkap Sekda Burhanudin. ● gio



IDN/ANTARA

JALAN AMBLES DI KAWASAN PROYEK TOL SERANG-PANIMBANG

Kondisi jalan yang ambles di Desa Kumpang, Lebak, Banten, Rabu (15/11). Jalan yang menjadi akses penghubung desa bagi warga yang berada di kawasan proyek pembangunan tol Serang-Panimbang tersebut kondisinya ambles sepanjang 10 meter sejak Selasa (14/11).

Jalan Penghubung Dua Desa di Proyek Tol Serang-Panimbang Ambles

LEBAK (IM)- Jalan penghubung Desa Kumpang-Bendungan di Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten, ambles. Akses jalan kedua desa itu berada di lokasi proyek Tol Serang-Panimbang seksi III.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa (14/11), sekitar pukul 08.00 WIB. Kepala BPBD Lebak, Febby Rizky Pratama menduga amblesnya jalan terjadi karena kontur tanah.

“Kalau dilihat secara kasatmata bisa jadi karena kontur tanah karena sebelah kanannya dulu itu danau jadi karena kondisi banyak air jadilah begitu (ambles). Bukan longsor, tapi ambles karena itu patah di tengah,” kata Febby kepada wartawan ditemui di kantornya, Rabu (15/11).

Febby menjelaskan, jalan penghubung antardesa ini berada di atas pembangunan jalan tol. Jalan penghubung sengaja dibangun karena jalan utamanya ditutup untuk proyek pembangunan jalan Tol.

“Jalan utamanya untuk sementara dipotong karena ada pembangunan jalan tol. Nah, PT Wika membangun jalan penghubung itu, rencananya kalau sudah beres akan disiapkan seperti fly-over,” tuturnya.

“Pembangunan jalan tolnya belum tembus. Betul, jalan yang ambles ini berada di atas, kalau tol di bawah. Tapi kondisinya belum tembus, jadi belum bisa disebut melintang,” sambungnya.

Untuk saat ini akses dua desa sementara dialihkan. Kepada BPBD, pihak yang membangun jalan Tol Serang-Panimbang akan melakukan perbaikan dengan estimasi waktu 5-7 hari pekerjaan.

“Iya jalan aktif, nah hasil musyawarah dengan PT Wika, mereka akan membangun jalan lagi nggak jauh dari lokasi. Sementara ini warga bisa menggunakan akses yang tersedia, jalan-jalan kecil di sekitarnya,” ucapnya. ● pra



Sekda Kabupaten Bogor, menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 di rapat paripurna.